

KEPENTINGAN NASIONAL CHINA DALAM KONFLIK LAUT CINA SELATAN

SETYASIH HARINI

Staf Pengajar Ilmu Hubungan Internasional Fisip Unsri Surakarta

Abstract

This article explores about national interest of China in conflict of South China Sea. The South China Sea is rich in potential natural resources especially hydrocarbons – oil and natural gas and fishery resources. It's also strategic international sea. But this is semi enclosed sea that surrounded ten coast countries and six of them are included in overlapping claims and territorial disputes. China, Vietnam, Malaysia, Philippines, Brunei Darussalam, and Taiwan all have made claims territorial sovereignty to various rights in that body of water. So The South China Sea is important to China not only for its strategic location but also because of its natural resources. For China, claim about The South China Sea is a core interest and to protect its core interest with military means because it was believed as a Chinese Lake. From economic, the national interest of China is that The South China Sea is used to enhance the economic reforms and promoting its economic development. As consequence of economic reforms make China to refind the new natural resources. The China successful of claim in The South China Sea can show the big power for another countries not only in Southeast Asia or East Asia (regional) and international.

Keywords: power, national interest, conflict, natural source

Pendahuluan

Sengketa tumpang tindih kepemilikan Laut Cina Selatan terutama Kepulauan Spratly belum berakhir hingga sekarang. Pada April 2010, China malah mengumumkan regulasi tentang operasi armada laut guna memperkuat hak pencarian ikan di Laut Cina Selatan. Keluarnya regulasi tersebut jelas telah mencoreng kesepakatan yang telah dibuat antara China dengan negara-negara ASEAN yang terlibat dalam persengkataan pada tahun 2002 yang dituangkan dalam *Declaration of Conduct* (DOC) (<http://bataviase.co.id/node/354962> diakses 3 Juli 2011). DOC ini sebenarnya merupakan upaya untuk memecahkan konflik tumpang tindih terhadap kawasan Laut Cina Selatan secara damai. Menurut artikel 122 dari Konvensi Hukum Laut (*The Law of the*

Sea Convention-1982) menyatakan bahwa Laut Cina Selatan tergolong sebagai laut *semi-enclosed* yang dikelilingi oleh dua negara atau lebih dan berhubungan dengan lautan atau samudra lain (Hasyim Djalal, *Indonesian Quarterly*, Vol. XVIII, No. 2, 1990). Dari artikel tersebut menunjukkan bahwa Laut Cina Selatan yang dikelilingi lebih dari satu negara memungkinkan terjadinya perebutan antara negara satu dengan lainnya. Ada sepuluh negara pantai (China dan Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina), serta negara tak berpantai yaitu Laos, dan dependent territory yaitu Makau yang memperebutkan kepemilikan Laut Cina Selatan (Usaha-Usaha Mengalihkan Potensi Konflik di Laut Cina Selatan Menjadi Potensi Kerjasama, Kerjasama Litbang DEPLU dengan Yayasan

Pusat Studi Asia Tenggara, 1995). Dari kesepuluh negara pantai tersebut, Chinalah yang paling terlihat sangat ambisi untuk memiliki. Namun jika dilihat mundur ke belakang, sejarah menunjukkan bahwa kepemilikan lautan ini berada di banyak negara seperti Inggris, Prancis, Jepang, China, dan Vietnam. Dalam perkembangannya Malaysia, Brunei, Filipina dan Taiwan juga terlibat.

Laut Cina Selatan selama ini menyimpan banyak potensi konflik. Ada enam negara pantai yang terlibat dalam konflik yakni China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Dilihat dari letak geografis Laut Cina Selatan menunjukkan adanya tumpang tindih perbatasan. Sebab perbatasan teritorial kedaulatan yang dimiliki oleh satu negara bertindihan dengan wilayah negara lain. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat perbatasan wilayah yang diukur dari laut lebih sulit dibandingkan dengan pembuatan batas negara yang berada di darat. Kesulitan pembuatan batas wilayah negara dari laut bukan hanya mengenai laut teritorial lebih dari itu yakni menyangkut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Dari segi politik kawasan ini dibatasi oleh negara-negara yang memiliki sejarah konflik dan pergolakan yang berkepanjangan. Sebagai akibatnya negara-negara tersebut sering dimasuki kekuatan-kekuatan ekstra regional yang pada gilirannya dapat mempengaruhi perdamaian dan stabilitas seperti kasus Indocina (James N Rosenau, *International Politics and Foreign Policy*, 1969). Secara strategis, negara-negara sekeliling Laut Cina Selatan selama Perang Dingin pernah menjadi pangkalan militer dan aliansi dengan AS-US (*Usaha-Usaha Mengalihkan Potensi Konflik di Laut Cina Selatan Menjadi Potensi Kerjasama*, Pusat Studi Asia Tenggara, 1995). Berakhirnya Perang Dingin masih mempunyai sisa-sisa pengaruh bagi Malaysia dan Singapura yang

pernah tergabung dalam *The Five Powers Defense Arrangement* bersama dengan Inggris, Australia, dan Selandia Baru (Denny Roy, *China's Foreign Relations*, 1998).

Secara yuridis kawasan ini menyimpan berbagai masalah yang berpotensi menjadi konflik regional. Konflik yang muncul berkaitan dengan klaim tumpang tindih atas pulau beserta karangnya, garis batas laut teritorial, landas kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Sebagai jalur komunikasi internasional, Laut Cina Selatan semakin rawan terhadap peningkatan eksplorasi dan eksploitasi minyak serta sumber alam lainnya. Program industrialisasi yang sedang digalakkan oleh negara-negara pantai memungkinkan timbulnya masalah kelautan seperti lalu lintas obat terlarang, pencurian, pembajakan, dan polusi lingkungan. Pada dasarnya sengketa teritorial serta klaim tumpang tindih kawasan laut Cina Selatan bukan hanya terbatas pada masalah kedaulatan atas kepemilikan pulau-pulau. Masalah hak berdaulat atas Landas Kontinen dan ZEE khususnya yang menyangkut penggunaan teknologi dalam rangka penambangan laut dalam (dasar laut). Kemungkinan itu bisa terjadi mengingat dalam melakukan penambangan dasar laut tanpa disadari dapat menembus kedaulatan negara lain.

Negara-negara pantai (China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam) yang mengajukan klaim kepemilikan atas kedaulatan teritorial di Laut Cina Selatan pada umumnya didasarkan pada penemuan (*discovery*), pendudukan (*occupation*), yurisdiksi administratif (*administrative jurisdiction*), pencantuman secara resmi ke dalam wilayah (*official incorporation into the territory*), konfirmasi dari perjanjian internasional (*confirmation of title by international agreement*), pengakuan internasional (*foreign recognition*), pelaksanaan wewenang secara damai dan kesinambungan (*peaceful and continuous*

display of authority), perkembangan sejarah (*historical development*), penyerahan hak dari negara lain (*succession right from foreign government*), hak kedaulatan atas landas kontinen (*sovereign rights over continental shelf*), dan hak berdaulat atas ZEE. Dari keenam negara pantai tersebut, China merupakan negara yang pertama kali mengajukan tuntutan kepemilikan (*Usaha-Usaha Mengalihkan Potensi Konflik di Laut Cina Selatan Menjadi Potensi Kerjasama*, Pusat Studi Asia Tenggara, 1995).

China dalam mengajukan tuntutan didasari oleh fakta sejarah, penemuan situs, dokumen-dokumen kuno, peta-peta, dan penggunaan gugus-gugus pulau oleh nelayannya. Dalam sejarah China, sejak 2000 tahun yang lalu banyak nelayannya yang telah melintasi perairan tersebut untuk mencari ikan. Beijing juga menegaskan bahwa negara yang pertama menemukan dan menduduki Kepulauan Spratly adalah China dengan didukung bukti-bukti arkeologis Cina dari Dinasti Han (206-220 Sebelum Masehi). Bagi China, lautan ini sangat penting bukan hanya karena banyaknya jenis ikan tapi juga kekayaan lainnya yang dapat mendukung perkembangan ekonomi, politik dan pertahanan keamanannya.

Laut Cina Selatan merupakan bagian dari Samudra Pasifik yang terbentang dari Selat Malaka dan Singapura di barat daya ke Selat Taiwan di timur laut. Luas perairan Laut Cina Selatan mencakup Teluk Siam yang dibatasi Vietnam, Kamboja, Thailand dan Malaysia serta Teluk Tonkin yang dibatasi Vietnam dan China. Kawasan laut Cina Selatan, bila dilihat dalam tata lautan internasional merupakan kawasan bernilai ekonomis, politis dan strategis. Kawasan ini menjadi sangat penting karena kondisi potensi geografisnya maupun potensi sumber daya alam yang dimilikinya. Wilayah ini meliputi lebih dari 200 pulau kecil, karang, dan terumbu karang yang sebagian besar berada di Paracel dan Spratly. Laut Cina

Selatan merupakan salah satu perairan penting dan strategis dalam pelayaran internasional bukan hanya bagi China dan kesepuluh negara pengklaim tapi juga negara-negara besar lainnya. Bagi Jepang, laut ini merupakan jalur pelayaran untuk tanker-tanker minyak dari Timur Tengah melalui Selat Malaka serta jalur perdagangan atau pengangkutan bahan-bahan mentah. AS memanfaatkan Laut Cina Selatan sebagai rute alternatif jalur pelayaran yang menghubungkan pantai barat AS ke Teluk Persia. Perairan ini juga dilalui oleh kapal niaga dalam melaksanakan aktivitas perdagangan dengan negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur. Bagi Rusia, lautan itu merupakan jalur pelayaran yang digunakan untuk lalu lintas minyak dan kapal niaga.

Seperti telah disebutkan di atas bahwa selain ramai sebagai lalu lintas perdagangan serta jalur pelayaran, Laut Cina Selatan juga memiliki sejumlah potensi kekayaan alam yang tak ternilai jumlahnya. Menurut penelitian yang diadakan oleh *The Committee for Coordination of Joint Prospecting for Mineral Resources in Asian Offshore Areas, Economic Commission for Asia and the Far East*, sejak dasawarsa 1960-an telah ditemukan mineral potensial terutama minyak dan gas (Asnani Usman dan Rizal Sukma, *Konflik Laut Cina Selatan dan Tantangan bagi ASEAN*, CSIS, 1997). Menurut perkiraan China tingkat produksi minyak Spratly mencapai 1,4-1,9 juta barel per hari. Selain kandungan minyak dan gas, Laut Cina Selatan juga berpotensi besar akan variasi jenis ikan. Letak geografi laut yang berdekatan dengan beberapa selat memungkinkan migrasi ikan dari satu ZEE ke ZEE lain. Hampir setengah dari Laut Cina Selatan diliputi landas kontinen sehingga bisa dimanfaatkan sebagai tempat usaha penangkapan ikan dasar dan ikan jenis menetap secara komersial.

Latar belakang sejarah dan penemuan-penemuan kuno seringkali dijadikan sebagai alasan bagi China untuk mempertahankan klaimnya atas kepemilikan Laut Cina Selatan. Hal ini yang kemudian ditindaklanjuti dengan *show of force*, yang cenderung menunjukkan povernya melalui aksi provokatif terhadap negara-negara pengklaim lainnya. Seperti terlihat dalam kebijakannya sejak awal era 1970-an hingga sekarang China secara intensif telah menunjukkan simbol-simbol kedaulatannya bahkan tidak jarang terlihat agresif dengan melakukan penyerangan terhadap kapal-kapal asing yang melintasi perairan Laut Cina Selatan guna mempertahankan sumber-sumber potensial barunya yang dapat mendukung kepentingan nasionalnya.

Dengan banyaknya sumber daya alam dan potensi strategis sebagai jalur perdagangan dan komunikasi internasional menjadikan Laut Cina Selatan ajang perebutan enam negara pantai yakni China, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Dari uraian di atas kemudian muncul pertanyaan apa kepentingan nasional China terhadap Laut Cina Selatan sehingga sejak terjangnya selama ini terlihat agresif bukan hanya kepada negara-negara pengklaim lainnya tapi juga kapal-kapal asing yang menggunakan perairan tersebut sebagai jalur perdagangan dan komunikasi?

Landasan Teori

Dalam mencermati sejak terjang China yang begitu agresif di kawasan Laut Cina Selatan menurut penulis dapat dilihat dari kepentingan nasionalnya. Konsep kepentingan nasional pada dasarnya menjelaskan bahwa untuk mencapai kelangsungan hidup suatu negara harus memenuhi kebutuhannya dengan memenuhi kepentingan nasionalnya. Dengan tercapainya kepentingan nasional maka kehidupan negara

akan berlangsung secara stabil, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, maupun pertahanan keamanan. Kepentingan nasional merupakan tujuan mendasar dan faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri.

Kepentingan nasional (*national interest*) menurut Daniel S. Papp adalah bahwa dalam kepentingan nasional terdapat beberapa aspek, seperti ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan militer, moralitas dan legalitas. Dalam hal ini, faktor ekonomi pada setiap kebijakan yang diambil oleh suatu negara adalah untuk meningkatkan perekonomian bersama. Bidang inilah yang sering dinilai sebagai suatu kepentingan nasional (Daniel S. Papp, 1988). Kepentingan nasional juga dapat dipahami sebagai konsep kunci dalam politik luar negeri. Konsep tersebut dapat diorientasikan pada ideologi suatu negara ataupun pada sistem nilai sebagai pedoman perilaku suatu negara terhadap negara lain. Artinya bahwa keputusan dan tindakan politik luar negeri bisa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan ideologis ataupun dapat terjadi atas dasar pertimbangan kepentingan ekonomi. Namun bisa juga terjadi interplay antara ideologi dengan kepentingan ekonomi sehingga terjalin hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara pertimbangan-pertimbangan ideologis dengan kepentingan ekonomi yang tidak menutup kemungkinan terciptanya formulasi kebijaksanaan politik luar negeri yang lain atau baru (Sumpena Prawira Saputra, 1985).

Menurut Anak Agung Banyu Berwita dan Yanyan Mochmamad Yani, konsep kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Para penganut realis menyamakan kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar power atau

kekuasaan. Dalam ranah hubungan internasional *power* adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol satu negara terhadap negara lain baik secara individual maupun kolektif. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui cara halus atau kasar. Antara lain adalah dengan teknik paksaan, atau kerjasama (*cooperation*). Kekuasaan nasional dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup dalam politik internasional (Anak Agung Banyu Perwita, 2006).

Pembahasan

Klaim kepemilikan atas kawasan Laut Cina Selatan yang dilakukan oleh China sejak dekade 1970-an didasarkan pada tiga hal pokok yakni kemajuan ekonomi, politik dan kebutuhan akan pertahanan dan keamanan. Pertumbuhan penduduk yang tergolong cepat memungkinkan adanya peningkatan pemanfaatan energi minyak. Bagi China, dalam jangka panjang cadangan minyak Laut Cina Selatan meskipun dalam jumlah yang belum pasti tetap akan digunakan untuk menopang kebutuhan dalam negeri. Kebutuhan akan cadangan minyak berlebih dari sumber baru sudah dirasakan sejak pertengahan tahun 1970-an yakni ketika produksi minyak China mengalami penurunan. Faktor eksternal yakni krisis minyak dunia juga turut memengaruhi perekonomian dalam negeri akan pentingnya cadangan minyak. Kemerosotan ini terus berlanjut sampai dekade berikutnya meskipun tidak diketahui jumlahnya secara pasti. Kemungkinan fakta ini dipengaruhi oleh cepatnya pertumbuhan penduduk dan industrialisasi selama program modernisasi. Kecenderungan itu berdampak pada permintaan masyarakat terhadap sumber energi mineral terus bertambah.

Sebagai konsekuensinya, China harus meningkatkan impor minyak dan gas, memperbaiki kapabilitas berproduksi atau kerjasama gabungan dalam mengeksplorasi daerah tepi pantai. Meningkatnya kebutuhan China akan minyak terlihat dari kebijakan impor pada tahun 1993. Menurut penilaian Hisahiro Kanayama dari *Institute for International Policy Studies* sampai bulan Juni 1994 diperkirakan kebutuhan energi China terutama minyak akan melebihi jumlah produksinya (Asnani Usman dan Rizal Sukma, *Konflik Laut Cina Selatan dan Tantangan bagi ASEAN*, CSIS, 1997). Guna mengurangi impor minyak, dalam jangka panjang negara ini memanfaatkan Laut Cina Selatan sebagai tempat memperoleh ladang minyak baru dan sekaligus sebagai jalur lalu lintas perdagangan.

Dari aspek politik, klaim tersebut berkaitan dengan strategi politik luar negeri China terhadap negara-negara Asia Tenggara. Laut Cina Selatan dianggap sebagai teritorial China untuk memproyeksikan peranan strategisnya secara aktual. Keterlibatan Beijing dalam persengketaan tersebut semata-mata hanya untuk menegaskan kembali perannya sebagai negara besar dalam percaturan regional. Berakhirnya konflik Kamboja telah mengubah peran Beijing yang sebelumnya memanfaatkan isu tersebut untuk menarik negara-negara non-komunis ke dalam pengaruhnya. Melalui langkah ini, China dapat mengisolasi posisi Vietnam secara regional. Penyelesaian Kamboja berdampak pada corak politik luar negeri China terhadap negara-negara Asia Tenggara terutama yang tergabung dalam ASEAN.

Sebagai upaya alternatif, negara tirai bambu ini berusaha mengembangkan hubungan kerjasama baru khususnya dalam bidang politik dan ekonomi. Kebijakan ini ditempuh sebagai upaya menghapus kesan “bahaya kuning atau ancaman dari utara”. Isu bahaya kuning seringkali dikaitkan dengan adanya pemberontakan komunis yang terjadi

di beberapa negara Asia Tenggara yang secara langsung maupun tidak disuport oleh China. Isu tersebut dan juga peristiwa Tiananmen yang dikaitkan dengan pelanggaran HAM telah menurunkan citra internasional.

Dari bidang pertahanan dan keamanan, klaim China berkaitan dengan kesalahan pengalaman masa lalu yang kurang memberi perhatian pada potensi laut. *Pertama*, faktor lemahnya kekuatan laut sekeliling China merupakan peluang yang mempermudah penetrasi imperialisme Barat yang pada akhirnya berakibat pada terbagi-baginya wilayah China ke dalam penguasaan kekuatan asing. Selama Perang Dingin persepsi ancaman terhadap Soviet muncul seiring dengan pembangunan pangkalan militernya di Vietnam. Hal ini terlihat ketika China memberi “pelajaran” terhadap Vietnam (1979) Uni Soviet juga telah mengirimkan armadanya sebagai penangkal terhadap inisiatif Angkatan Laut China di Pulau Hainan dan Kepulauan Paracel. *Kedua*, dalam kaitannya dengan kepentingan keamanan, Cina membutuhkan suatu armada angkatan laut yang kuat dan pangkalan yang strategis.

Ketegasan sikap China dalam mempertahankan klaimnya atas wilayah Laut Cina Selatan juga berkaitan dengan niatnya untuk memperoleh status sebagai kekuatan maritim yang handal bukan hanya di tingkat regional (Asia Timur dan Asia Tenggara) tapi juga internasional. Sebagai salah satu sasaran program modernisasi, China berusaha mengembangkan kemampuan Angkatan Laut guna meningkatkan statusnya dari “kekuatan pantai” menjadi kekuatan laut biru (*blue water navy*), suatu kekuatan yang memiliki kemampuan proyeksi jauh ke wilayah samudra luas. Artinya kekuatan laut biru dapat dijadikan sebagai penyeimbang kekuatan ekonomi yang semakin dipertimbangkan di arena internasional.

Selain ketiga hal di atas, China sensitif terhadap masalah kedaulatan akibat penindasan asing. Bayang-bayang ancaman dari luar negeri muncul kembali bersamaan dengan pecahnya Soviet menjadi beberapa negara merdeka. Bagi pemimpin Beijing, semangat nasionalisme tersebut dapat menyebar sehingga bisa menimbulkan disintegrasi bangsa. Fenomena ini berkaitan dengan daerah-daerah minoritas yang pernah mengalami tekanan berat dari pemerintah pusat. Strategi China dalam sengketa Laut Cina Selatan merupakan paket yang sama dengan usaha mempertahankan integritas teritorialnya. Kepentingan China terhadap Laut Cina Selatan terutama Kepulauan Spratly dan Paracel tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi dan menunjang program modernisasi namun juga upaya penyatuan Taiwan. Apabila China berhasil menguasai dan mengontrol lalu lintas kapal yang melintasi Laut Cina Selatan, maka negara ini mampu mempertahankan integritas Taiwan sebagai teritorinya yang terwujud dalam semboyan “satu China”.

Kesimpulan

Laut Cina Selatan merupakan kawasan perairan yang mengandung banyak potensi konflik. Potensi konflik tersebut dapat dilihat dari letak geografisnya yang dimiliki oleh banyak negara. Asumsi tersebut dikaitkan dengan sulitnya membuat batas wilayah laut negara-negara pantai (sepuluh negara pantai). Kesulitan yang muncul dari kondisi geografis ini juga berkaitan dengan eksplorasi sumber alam yang terkandung di dalamnya. Ketika suatu negara pantai mengadakan penambangan sampai ke dasar laut atau laut dalam kemungkinan besar dapat memasuki wilayah kedaulatan negara lain. Demikian juga ketika para nelayan sederhana yang tanpa diketahui telah memasuki teritori negara lain. Selain itu juga karena sejarah

menunjukkan bahwa kepemilikan lautan tersebut bukan hanya dimiliki oleh satu negara. Padahal potensi laut yang ada di dalam dan disar laut sangat besar. Selain kandungan ikan yang sangat banyak macamnya juga terdapat sumber minyak dan gas bumi. Lautan ini juga sangat strategis sebagai jalur perdagangan dan komunikasi internasional.

Dengan banyaknya sumber kekayaan yang terkandung di kawasan Laut Cina Selatan maka enam negara pantai yakni China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam berusaha mengklaim sebagai teritorinya. Dari keenam negara pantai tersebut, China sebagai negara yang pertama kali mengajukan klaimnya. Adapun dasar dari klaim China adalah faktor sejarah dan pemanfaatan laut oleh para nelayan sebagai tempat mencari ikan dan jalur perdagangan.

Klaim China terhadap Laut Cina Selatan yang semakin lama terlihat begitu agresif dilatarbelakangi oleh kepentingan nasionalnya. Pertama, dari segi ekonomi menunjukkan keberhasilan modernisasi yang dimulai dari masa Deng Xiaping hingga sekarang. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat yang disertai dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat tentu membutuhkan sumber energi yang semakin besar. Sumber energi terutama energi alam dari dalam negeri semakin lama tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Sebagai konsekuensinya, pemerintah Beijing perlu mencari sumber alam alternatif dari luar negeri. Laut Cina Selatan berdasarkan berbagai penelitian menunjukkan adanya kekayaan alam yang melimpah sehingga dapat dijadikan sebagai sumber energi untuk masa mendatang.

Dengan terpenuhinya energi baru untuk pembangunan ekonomi (faktor internal), China dapat lebih memposisikan negaranya sebagai “the big power” untuk

kawasan regional dan internasional. Dengan berhasilnya klaim teritorial Laut Cina Selatan dapat diartikan bahwa terintegrasi kembali wilayahnya sebab Taiwan juga terlibat sebagai negara pengklaim. Padahal Taiwan selama ini tidak diakui sebagai negara merdeka dan berdaulat dengan semboyan “satu China”. Terakhir Laut Cina Selatan yang selama ini telah ramai dilalui kapal-kapal asing sebagai jalur komunikasi dan perdagangan internasional dapat dimungkinkan sebagai halaman belakang China. Artinya dengan alasan dan pengalaman sejarah, China berhak menggunakan perairan itu sebagai pertahanan guna menghadapi penetrasi dan invasi yang mungkin timbul dari negara-negara lain.

Kepustakaan

- Burchill Scot, and Andrew Linklater, 1996. *Theories of International Relations*, London: McMillan Press.
- Hill, Michael, 1997. *The Policy Process in The Modern State*, London: Prentice Hall.
- Jones, Walter S, 1993. *Logika Hubungan Internasional* (terjem), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Papp, Daniel S, 1988. *Contemporary International Relations”: A Framework for Understanding*, Second Editions, New York: MacMillan Publishing Company.
- Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochmamad Yani, 2006. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Rosenau, James N, 1969. *International Politics and Foreign Policy*, New York: the Free Press.
- Roy, Denny, 1998. *China’s Foreign Relations*, london: McMillan.
- Saputra, Sumpena Prawira, 1985. *Politik Luar Negeri Indonesia*, Jakarta: Remaja Karya Offset.

Hasyim Djalal, 1990: *Indonesian Quarterly*
Vol. XVIII, No. 2, Jakarta:CSIS

Asnani Usman dan Rizal Sukma, 1997.
*Konflik Laut Cina Selatan dan Tantangan
bagi ASEAN*, Jakarta: CSIS

Usaha-Usaha Mengalihkan Potensi Konflik
di Laut Cina Selatan Menjadi Potensi
Kerjasama, Kerjasama Litbang DEPLU

dengan Yayasan Pusat Studi Asia
Tenggara, 1995

<http://nationalinterest.org/blog/the-skeptics/more-trouble-south-china-sea-5465>

<http://bataviase.co.id/node/354962>

http://www.nytimes.com/2011/03/31/world/asia/31beijing.html?_r=1